

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KETIGA MEI 2012

Minggu ketiga Mei 2012 ini kegiatan DPR bersama seluruh Alat Kelengkapan Dewan diawali dengan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 pada tanggal 14 Mei 2012. Berikut ringkasan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV.

Pidato Ketua DPR diawali dengan ucapan belasungkawa dan mengheningkan cipta atas terjadinya tragedi kecelakaan pesawat penumpang Sukhoi Super Jet 100 (SSJ 100) buatan Rusia yang menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat di daerah Gunung Salak, Bogor.

Tragedi ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi dunia penerbangan kita. Kepada seluruh Tim evakuasi, BASARNAS, prajurit TNI dan Polri, relawan dan semua pihak, disampaikan penghargaan luar biasa atas langkah-langkah yang tidak kenal lelah, yang telah dilakukan dalam rangka evakuasi kemanusiaan seluruh korban kecelakaan pesawat Sukhoi.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Untuk masa persidangan IV, Dewan akan menangani beberapa RUU Prioritas, yaitu: Pertama, ada 2 (dua) RUU yang telah selesai dibahas oleh Panitia Kerja di Komisi X, menjelang pengambilan keputusan di tingkat Komisi (pembicaraan tingkat I) ditunda, karena Pemerintah meminta waktu untuk memantapkan koordinasinya di kalangan internal mereka. RUU tersebut adalah RUU tentang Pendidikan Tinggi, dan satu RUU lagi yaitu RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Kedua, ada 7 (tujuh) RUU yang telah lama dibahas, bahkan telah mengalami perpanjangan waktu pembahasan melalui keputusan Rapat Paripurna, diantaranya yaitu RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

Ketiga, ada 7 (tujuh) RUU yang telah dan segera akan dibahas pada masa sidang sekarang ini dan berlanjut pada masa sidang yang akan datang. Antara lain; RUU tentang Organisasi Massa, RUU tentang Perlindungan dan Pember-



dayaan Petani, RUU tentang Pangan. Keempat, RUU yang sudah diputuskan penanganannya oleh Dewan, yaitu RUU tentang Perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Desa, serta RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kelima, ada 6 (enam) RUU yang telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, menunggu Surat Presiden untuk penunjukan Menteri yang akan menanganinya bersama DPR.

Keenam, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang baru saja kita terima dari Presiden, kita yakini memerlukan prioritas penanganan

karena sangat penting bagi dunia ekonomi. Ketujuh, ada 23 (dua puluh tiga) RUU yang dipersiapkan oleh Badan Legislasi dan Komisi-Komisi Dewan dalam bentuk Naskah Akademik, selain 14 (empat belas) RUU yang disiapkan oleh Pemerintah. Dan delapan, 19 (sembilanbelas) RUU Pemekaran Daerah, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan 18 (delapan belas) RUU pembentukan Kabupaten/Kota.

Mengingat banyaknya RUU yang harus diselesaikan, Pimpinan meminta AKD yang menangani RUU untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, mengingat untuk

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Masa Persidangan I tahun sidang 2012-2013, Dewan akan fokus membahas RAPBN 2013.

Tahun 2012 adalah tahun yang sangat ideal apabila Dewan berkehendak memacu pelaksanaan fungsi legislasi, karena, untuk tahun 2013, diperkirakan hanya dapat memanfaatkan fungsi legislasi dalam Masa Persidangan III dan IV (sekitar Januari sampai dengan Juli 2013, agustus sampai dengan Oktober 2013 untuk pembahasan APBN 2014, dan sesudah itu, anggota Dewan yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif akan mengambil bagian dalam kampanye Pemilu 2014).

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam menjalankan fungsi anggaran, selain memantau pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 oleh Komisi-Komisi DPR, maka untuk memenuhi Pasal 157 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Dewan akan menjadwalkan pembahasan tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 pada Masa Persidangan IV. Hal ini merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 152. Pimpinan mengingatkan bahwa pembahasan dalam tataran Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 harus benar-benar dilakukan dengan penuh ketelitian dengan mengedepankan profesionalitas dalam menentukan kebijakan anggaran negara, karena hasil Pembicaraan Pendahuluan akan menjadi dasar Pemerintah untuk menyusun besaran APBN 2013 yang akan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2012 yang akan datang. Dalam kaitan ini Badan Anggaran akan membentuk 4 (empat) Panitia Kerja agar pembahasannya lebih efisien dan efektif. Kepada Komisi VII, diminta untuk melakukan pembahasan dengan mitra kerjanya berkaitan dengan asumsi harga minyak mentah dan lifting minyak, kepada Komisi XI, juga diminta melakukan pembahasan bersama Pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, nilai tukar dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN).

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan melan-

jutkan tugas Tim Pengawas Century yang prosesnya masih berlangsung sampai saat ini. Pimpinan Dewan mengharapkan kerjasama dari aparat penegak hukum, secara khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja lebih intensif menindaklanjuti hasil rapat Tim Pengawas Century pada Masa Persidangan III yang lalu. Pimpinan Dewan juga mengharapkan agar hasil yang lebih konkret dari Tim Pengawas Century agar ada kepastian hukum bagi setiap pihak.

Dewan dalam hal ini BAKN DPR diharapkan fokus kepada ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan BPK-RI kepada DPR. BAKN harus melakukan telaahan dan hasilnya disampaikan kepada Komisi-komisi untuk ditindaklanjuti, sebagai bentuk pengawasan Dewan terhadap pengelolaan APBN. Pengawasan ini diharapkan dilakukan dengan lebih efektif agar kedepan pengelolaan keuangan negara makin transparan, akuntabel dan kualitas pemeriksaan juga akan semakin baik.

Komisi II memutuskan untuk membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Pertimbangan utama, banyaknya konflik pertanahan, perkebunan dan pertambangan, masih saja terjadi. Pertimbangan lainnya adalah rekomendasi Panitia Kerja Sengketa dan Konflik Pertanahan tak pernah dituntaskan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tim ini akan melibatkan sejumlah Komisi. Tim ini diharapkan dapat mendorong pemerintah menuntaskan persoalan sengketa lahan dan konflik agraria. Tim ini akan bekerja dalam Masa Persidangan IV.

Pejabat Publik

Pejabat-pejabat publik yang akan diproses pada Masa Sidang IV, antara lain: Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) untuk melengkapi 9 calon yang ditentukan.

Surat Masuk

Pada awal Pidato, Ketua DPR menyampaikan beberapa surat masuk, yaitu: [1] Surat dari Presiden RI Nomor: R-39/Pres/04/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Penyampaian RUU tentang Jaring Pengaman Sistem keuangan (JPSK). [2] Surat





dari Presiden RI Nomor: R-40/Pres/04/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Calon Dubes LBBP negara sahabat untuk Indonesia. [3] Surat dari Presiden RI Nomor: R-45/Pres/05/2012 tanggal 9 Mei 2012 perihal penyampaian kembali RUU tentang keamanan nasional. [4] Surat dari Pimpinan Badan kehormatan DPR-RI Nomor: 174/Sk-Bk/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tanggal 13 April 2012 perihal Penyampaian keputusan badan kehormatan DPR-RI. [5] Surat dari Menteri Pertahanan RI Nomor: B/578/M/IV/2012 tanggal 13 April 2012 perihal permohonan persetujuan hibah 6 (enam) Pucuk meriam salute gun kepada pemerintah republik demokratik timor leste.

Sesuai dengan ketentuan peraturan DPR-RI tentang Tata tertib, untuk surat [1] dan [4] akan diteruskan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjuti. Untuk surat [2] akan diteruskan kepada Rapat Konsultasi antara pimpinan DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi dan Komisi I DPR-RI. Sedangkan surat [3] akan diteruskan kepada Pansus RUU tentang keamanan nasional.

Khusus untuk menindaklanjuti Surat [5], Pasal 197 peraturan DPR-RI tentang tata tertib menyatakan “DPR memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan keuangan negara”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 peraturan DPR-RI tentang Tata tertib dan terbatasnya waktu, pimpinan akan meneruskan surat tersebut ke Komisi I DPR-RI untuk mem bahasannya. Sesuai permintaan dari kementerian pertahanan, 6(enam) pucuk meriam tersebut akan digunakan dalam rangka menyambut kedatangan presiden RI pada acara peringatan HUT Republik Demokratik Timor Leste ke-10 tanggal 19-20 Mei 2012. Oleh karena itu, Komisi I DPR ditugaskan

untuk segera membahas permohonan persetujuan hibah tersebut dan menyampaikan hasilnya pada Rapat Paripurna Dewan kembali tanggal 16 Mei 2012 untuk diambil keputusan.

Diplomasi Parlemen

Berkaitan dengan kiprah DPR-RI di bidang diplomasi parlemen, disampaikan bahwa saat ini DPR tengah dalam persiapan sebagai tuan rumah pelaksanaan Sidang Executive Committee Meeting (Excom) AIPA dan Sidang AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat The Drug Menace ke-9 yang akan berlangsung pada tanggal 8-12 Juli 2012 di Yogyakarta. Melalui Sidang EXCOM, akan ditentukan topik dan agenda di bidang politik, ekonomi, sosial maupun yang berkaitan dengan keorganisasian AIPA, dan akan dibahas pada Sidang Umum AIPA ke-33 yang direncanakan akan berlangsung tanggal 16-22 September 2012 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Permasalahan kawasan/regional juga mendapat perhatian dewan.

[1] Myanmar. Melihat pada perkembangan yang berlangsung di kawasan saat ini, terdapat satu perubahan penting pada proses transisi demokrasi di Myanmar, dimana Pemilu legislatif yang diikuti oleh seluruh elemen politik dalam masyarakat telah berhasil dilaksanakan secara demokratis, lancar dan aman. Terlepas dari masih adanya kekurangan dalam proses demokratisasi negara tersebut, Ketua DPR mengapresiasi perkembangan demokrasi yang terjadi, dan berharap hal ini terus berjalan secara positif sesuai dengan harapan masyarakat Myanmar dan internasional.

[2] Timor Leste. Dewan menyambut positif telah dilaksanakannya Pemilihan Presiden Timor Leste secara aman dan damai, dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Taur Matan Ruak sebagai presiden yang baru. Diharapkan, kepemimpinan Presiden Taur Matan Ruak dapat membawa kemajuan bagi rakyat Timor Leste dan hubungan bilateral kedua negara.

[3] Sengketa Laut Cina selatan dan Semenanjung Korea. Dewan prihatin atas persoalan sengketa Laut Cina Selatan dan situasi di Semenanjung Korea yang belum juga kondusif. Bagi Indonesia, penyelesaian damai atas kasus Laut Cina Selatan, sangat berarti demi menjaga stabilitas keamanan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk Semenanjung Korea, kita mengharapkan agar kedua Korea dapat duduk kembali dalam meja perundingan, untuk menyelesaikan persoalannya dengan baik.

[4] lain-lain. Kegiatan DPR dalam rangka diplomasi parlemen, pada Masa Persidangan IV ini, Dewan akan menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura, Presiden Portugal, Ketua Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, dan Ketua Parlemen Thailand. Diharapkan, kunjungan tersebut dapat meningkatkan persahabatan kedua negara dan kedua bangsa.*

DPR dan Pemerintah Sepakat Pembahasan RUU Desa Dilanjutkan

DPR bersama Pemerintah bersama-sama menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa.

Bagaimana, apakah bersama bisa kita setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Desa,” kata pimpinan rapat Ibnu Munzir (F-PG) saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/5).

“Setuju...” kata anggota Pansus Desa secara bersama-sama, dan palu pun diketok pimpinan tanda sepakat. Sebelumnya, dalam pernyataannya, beberapa fraksi menyetujui agar RUU Desa ini dilanjutkan pembahasannya.

Menurut juru bicara dari F-Partai Golkar yang diwakili oleh Ali Wongso, dia mengatakan dalam pembahasan substansi diharapkan betul-betul tercipta sebuah design yang bagus, baik itu aspek pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan



Suasana Rapat Pansus Desa

pembangunan di desa, kita tentu berharap pembangunan desa, dimana manusia, masyarakat desa akan ditempatkan pada posisi subyek yang eksis, didalam proses kehidupan mereka di desa itu,” jelas Ali Wongso.

Sementara Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan, dalam proses penyusunan RUU Desa, pemerintah telah berusaha mengakomodasi masukan-masukan yang disampaikan berbagai pihak berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang berkembang di desa.

“UU tentang Desa tersebut diharapkan mampu mawadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan, sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan semangat modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang,” kata Mendagri dihadapan anggota Pansus Desa. (nt) foto: wy/parle



Ali Wongso (kiri) saat berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kanan)

berikut dengan pelayanan masyarakat desa, menjadi sebuah bagian dari sistem building, yang akan membawa masyarakat desa meningkat taraf de-

rajat kehidupannya di segala bidang.

“Banyak hal yang nanti akan diperdebatkan, karena pembangunan desa tentu sangat berbeda dengan

DPR RI Ajak Pemerintah Bahas Kewenangan Pusat dan Daerah

DPR RI menilai pelaksanaan Otonomi Daerah selama ini masih belum jelas koridornya antara pengelolaan di pusat dan daerah.

“DPR RI mengajak Pemerintah untuk bekerja sama menjabarkan lebih lanjut kewenangan Pusat dan Daerah, serta tanggungjawabnya secara jelas,” kata Marzuki Alie dalam Pidatonya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012, Senin (14/5).

Menurutnya, perlu penjabaran kewenangan pusat dan daerah terutama mengenai kewenangan yang menga-

tur publik, dana, pendidikan, kesehatan dan personalia.

DPR menghargai dan memperhatikan peringatan Wakil Presiden dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-16 tanggal 25 April 2012 yang lalu, dimana pelaksanaan Otonomi Daerah masih tumpang tindih antara keputusan pusat dan daerah sehingga perlu ada perbaikan secepatnya oleh semua pihak.

“Kita memang harus jujur untuk mengakui hal itu. karena itu Dewan sependapat bahwa sumber penyebab masih tumpang tindihnya desentralisasi pelaksanaan Otonomi Daerah, antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban,”ujarnya.

Selain itu, Dewan sependapat

bahwa perlu penerapan “reward and punishment” terhadap setiap institusi atau daerah yang dinilai berhasil atau gagal dalam melaksanakan pemerintahannya. “Dewan perlu lebih memberi perhatian dan memantau secara serius dalam masalah kebutuhan mendasar tersebut,” katanya.

Dalam kaitan dengan masalah otonomi daerah, kalangan Dewan sangat menyesalkan terjadinya pembakaran terhadap kantor Pemerintah Kabupaten Mesuji oleh massa pendukung wakil bupati yang diberhentikan. “Ini adalah tindakan anarkis yang tidak boleh dibiarkan dan perlu diambil tindakan hukum yang tegas agar ke depan tidak terjadi lagi tindakan-tindakan melawan hukum semacam itu,” tegas Marzuki Alie. (as)/foto: iwan armanias/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie



Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011-2012

DPR RI Harapkan Perdamaian Kawasan Semenanjung Korea

DPR RI mengharapkan situasi Semenanjung Korea tenang dan tidak bergejolak. Selain itu, diharapkan semua pihak ikut berkontribusi menciptakan situasi kawasan yang damai.

“Hal itu, dapat terwujud dengan tidak saling menunjukkan kekuatan secara militer, termasuk meluncurkan roket yang terjadi beberapa waktu lalu, walaupun sudah ada himbauan dari dunia internasional,” ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Kunjungan Kehormatan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara Y.M Kim Yong Nam, di Gedung DPR RI, Selasa (15/5).

Pertemuan ini, lanjutnya, akan memberikan dorongan kepada Korea Utara bahwa perang tidak menguntungkan kedua Negara. “Kita harapkan semuanya dapat menahan diri, dan Kawasan Semenanjung Korea yang damai tentu berdampak kepada kawasan lainnya, termasuk Asia Tenggara, Asia dan Dunia pada umumnya,” kata Marzuki Alie.

Selanjutnya, Marzuki Alie mengharapkan kalau ada keinginan dari masyarakat Korea untuk menyatukan Utara dan Selatan, karena pada dasarnya mereka bersaudara antara



Foto bersama Pimpinan DPR RI dan Tamu Kerhormatan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara Y.M Kim Yong Nam setelah acara pertemuan

Utara dan Selatan. “Kalau ada keinginan masyarakat Korea untuk bersatu tentunya bisa dilakukan dengan proses yang baik, proses damai dengan mendengarkan suara rakyat,” tegasnya.

Dalam pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara. Y.M. Kim Yong Nam meng-

harapkan Negara Indonesia mengetahui posisi Korea Utara. pada kesempatan itu dia mengundang Ketua DPR RI untuk berkunjung ke Korea Utara. Terkait undangan tersebut, Marzuki Alie menyampaikan akan mengagendakan untuk melakukan kunjungan ke Korea Utara. (as) foto:wy/parle

Putusan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Tidak Maksimal

Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai putusan pengadilan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

“Putusan badan peradilan belum memberikan hukuman atau vonis yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi,” kata Marzuki Alie, di Gedung DPR RI.

Menurutnya, pandangan masyarakat terhadap ketidakadilan atas putusan badan peradilan yang tidak maksimal, membuat sebagian orang merasa apatis dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Dalam Pidato Ketua DPR RI Marzuki Alie pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persida-

ngan IV Tahun Sidang 2011-2012, Senin (14/5).

Hal ini mengundang perhatian pimpinan dan anggota Dewan, diantaranya masalah tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses peradilan. Sudah banyak putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi disisi lain masih saja terjadi tindak pidana korupsi.

Dewan tidak dapat mencampuri urusan yudikatif, apapun putusan peradilan harus kita hormati. “Kita me-



Ketua DPR RI Marzuki Alie

ngetahui bahwa saat ini badan peradilan termasuk bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka,” jelasnya. (as) foto:parle

Pimpinan DPR Prihatin Belum Optimalnya Fungsi Legislasi

Pimpinan DPR prihatin atas pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, dari 64 RUU yang disetujui dalam RUU Prioritas Tahun 2012, baru 2 RUU Prioritas yang diselesaikan.



Jajaran Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011-2012

Pimpinan Dewan mengingatkan kepada Alat Kelengkapan Dewan, baik Komisi, Panitia Khusus maupun Badan Legislasi untuk benar-benar fokus menangani fungsi legislasi.

“Pelaksanaan fungsi Dewan harus dioptimalkan, khususnya pelaksanaan fungsi legislasi yang masih memprihatinkan” tegas Ketua DPR RI saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 di gedung DPR RI Nusantara II, Senin (14/5).

Dijelaskan, dengan melihat ke depan di Tahun 2013, diperkirakan, agenda kegiatan untuk penanganan fungsi legislasi akan berjalan sampai persidangan III dan IV (sampai pertengahan Juli 2013). Karena untuk Masa Persidangan I Tahun 2013-2014, akan dititikberatkan kepada pembahasan anggaran, baik mengenai pembahasan RUU APBN maupun RUU APBN-Perubahan.

Sedangkan lanjut Ketua, Masa Per-

sidangan II Tahun Sidang 2013-2014 perpolitikan di tanah air akan diwarnai kegiatan kampanye menghadapi Pemilu 2014. Dipastikan para anggota Dewan akan mengambil bagian dalam Pemilu Legislatif 2014 tidak dapat sepenuhnya melakukan kegiatan kedewanan.

Oleh karena itu, Pimpinan Dewan tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Alat Kelengkapan Dewan, baik Komisi, Panitia Khusus maupun Badan Legislasi, untuk benar-benar fokus menangani fungsi legislasi. “Sebagaimana pernah saya sampaikan, tahun 2012 adalah tahun yang sangat ideal apabila kita berkehendak memacu pelaksanaan fungsi ini. Kita harus mempunyai tekad dan semangat untuk mendekati target prioritas yang telah ditetapkan” kata Ketua DPR.

Ketua DPR memahami, kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan fungsi ini tidak semata-mata dihadapi DPR seperti rapat-rapat yang berjalan bersamaan

waktu dan sulitnya mempertemukan kata sepakat terhadap beberapa materi tertentu, tetapi Pemerintah pun menghadapi masalah yang sama antara lain perlunya pemantapan koordinasi dan konsolidasi internal Pemerintah. “Termasuk harus menyiapkan 14 RUU yang telah menjadi prioritas yang harus disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan,” papar Marzuki Alie.

Pimpinan Dewan, tambah Ketua, selain memberikan dorongan bagi penyelesaiannya, juga bersiap membantu Alat kelengkapan Dewan, manakala dalam pembahasan RUU menemui kendala berkaitan dengan sulitnya mendapatkan titik temu dalam substansi-substansi strategis. “Berbagai terobosan dan langkah-langkah akan dilakukan, baik melalui konsultasi antar-fraksi maupun konsultasi dengan Presiden, “ ungkapnya.(ddg) foto:iw/parle

Ahmad Dhani Ditantang Bikin Draft RUU Hak Cipta Sandingan

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta mereka membentuk kelompok agar dapat lebih efektif mencermati rangkaian pembahasan undang-undang tersebut.

“Sebaiknya Ahmad Dhani langsung pimpin kelompok tersebut, pasti akan banyak aspirasi yang akan tumpah dari rekan-rekan musisi, artis. Kelompok dibentuk informal saja dan lakukan pembahasan sampai menghasilkan draf tandingan, itu bisa jadi second opinion bagi DPR,” kata Priyo dalam pertemuan dengan perwakilan artis yang dipimpin musisi Ahmad Dhani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/12).

Ia menambahkan dari informasi yang diterimanya draf RUU sejauh ini lebih banyak mengakomodir karya tulis, buku dan terkait IT. Sedangkan permasalahan hak cipta dikalangan artis kurang mengemuka. Perjuangan lewat kelompok dinilai akan lebih efektif dari pada satu persatu maju dan yang bicara ke DPR selalu berganti orang.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I Tantowi Yahya yang mengaku sangat terbantu ketika pelaku industri penyiaran menyerahkan draf tandingan. Pembahasan RUU Penyiaran menjadi lebih sempurna karena input yang diterima dari pihak-pihak terkait sangat lengkap.

Anggota Komisi III Nudirman Munir yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan pembahasan RUU Hak Cipta sudah berlangsung di Baleg. Ia mengakui materi lebih banyak pada masalah non musik, sedangkan ranah lain terbatas. “Pada saat pembahasan di Komisi III nanti, kita siap mengundang untuk menampung pemikiran dari para artis dan seniman kita,” imbuhnya.

Ahmad Dhani pentolan kelompok musik Dewa 19 mengatakan akan menindaklanjuti input yang disampaikan Wakil Ketua DPR. “Pembajakan karya cipta di Indonesia memang sudah sangat serius jadi perlu action dari pemerintah, semua pihak terkaitlah,” paparnya. Dhani datang ke DPR bersama artis lain diantaranya Syahrini, Mu-

lan Jameela serta pelaku industri rekaman dari Sony Music, Toto Widjojo.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku terkejut mengetahui besarnya potensi kerugian akibat aksi download lagu/musik ilegal yang mencapai Rp. 2 triliun rupiah/situs setiap tahunnya. “Situs download ilegal seperti ini ditutup saja. Pak Tif, Menteri Koinfo perlu segera dipanggil Komisi I untuk menindaklanjuti masalah ini,” kata Priyo

Apabila kondisi ini tidak segera ditertibkan politisi Partai Golkar ini menilai, dapat meruntuhkan kreatifitas para seniman dan industri rekaman yang telah memberikan kontribusi bagi bangsa. “Kita memperhatikan pelaku kejahatan ini jumlahnya bisa puluhan situs maka omset kejahatan ini dipastikan lebih besar lagi mencapai angka puluhan triliun rupiah,”ujarnya.

Ahmad Dhani membenarkan kondisi ini telah mengganggu kreatifitas artis dalam berkarya karena penju-

lan album mereka merosot sampai 90 persen. Ia menggambarkan pada tahun 1997 rata-rata penjualan album pada saat itu mencapai 8 juta kaset/bulan. Tahun 2007 merosot tajam hanya berkisar 800 ribu keping/bulan.

“Kalau pemerintah bisa menutup situs porno, mengapa kebijakan yang sama tidak dilakukan pada situs yang jelas melakukan aksi ilegal ini, Industri musik bisa mati kalau dibiarkan,” tandas Dhani.

Sementara itu Toto Widjojo dari Sony Music menjelaskan, beberapa negara sudah mengambil tindakan tegas pada situs download illegal. Amerika misalnya mendenda pengelola situs Napster ratusan juta dolar dan akhirnya tutup. Kasus lain pemilik situs Megaupload.com diburu Interpol sampai ke New Zealand. Perusahaannya terancam bankrut karena sanksi hukum dan denda tidak sedikit. (iky) foto:ry/parle



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (tengah) saat pertemuan dengan Ahmad Dhani (kiri)

Tim Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria DPR Harus Bela Rakyat

DPR perlu mendorong penyelesaian sengketa pertanahan dan agraria yang bagi sebagian pihak dianggap sebagai 'penindasan' yang dilakukan pemilik modal yang kuat pada warga masyarakat yang lemah dan tidak berdaya.



Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011-2012



Ketua DPR RI Marzuki Ali

Oleh karenanya usulan Komisi II untuk membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria patut didukung.

"Upaya ini merupakan ruh semangat Dewan untuk membela kepentingan rakyat dalam masalah sengketa pertanahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan," kata Ketua DPR RI Marzuki Ali dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun si-

dang 2011-2012 pada rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/12).

Tim ini lanjutnya akan didukung oleh sejumlah anggota dari Komisi terkait dengan pertimbangan tidak sedikit sengketa atau konflik pertanahan berhubungan dengan aparat keamanan, Kementerian Kehutanan, Pertambangan, Pemda dan juga pihak swasta.

Sementara itu dihubungi pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi II Hakam Naja menjelaskan pembentukan Tim lintas Komisi dipandang perlu setelah Panja Sengketa dan Konflik Pertanahan tidak dapat bekerja optimal. Masalah pertanahan menurutnya tidak hanya menyangkut BPN yang menjadi mitra Komisi II.

"Kasus kerusakan di NTB misalnya terkait pertambangan merupakan mitra Komisi VII, kasus Mesuji ada hubungannya dengan perkebunan mitra Komisi IV," imbuh politisi PAN ini. Rapat Badan Musyawarah nantinya akan membahas nama-nama anggota Komisi yang ditunjuk, serta agenda kerja yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Pada akhir masa tugas, Tim diminta menyampaikan rekomendasi kepada Paripurna DPR dan selanjutnya kepada pemerintah dalam hal ini Presiden RI. "Harapannya Tim dapat mendorong dan menekan pemerintah menuntaskan persoalan sengketa lahan dan konflik agraria, menghasilkan solusi yang efektif," demikian Hakam. (iky) foto:parle

DPR Segera Pilih Anggota DKPP

DPR akan segera memilih Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, pembentukan lembaga itu merupakan amanat dari UU no.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Institusi baru yang bersifat tetap dan didukung 7 orang anggota, 3 orang diantaranya dipilih DPR, 2 dipilih pemerintah, 2 lainnya masing-masing mewakili KPU dan Bawaslu.

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Agar hal-hal yang terjadi pada pemilu lalu tidak lagi terjadi seperti Tom and Jerry antara KPU dan Bawaslu,” kata Ketua Komisi II Agun Gunanjar dalam konperensi pers di Ruang Wartawan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/12).

Ia menambahkan undang-undang juga mengatur pembentukan DKPP harus dilakukan paling lama 2 bulan setelah anggota KPU dan Bawaslu

mengucapkan sumpah dan janji. Itu artinya pada tanggal 11 Juni nanti DKPP sudah harus terbentuk.

Dalam Pasal 109 UU no.15/2011 diatur anggota DKPP berasal dari tokoh masyarakat yang kemudian dijabarkan dalam penjelasan adalah seorang akademisi atau tokoh yang memiliki etika penyelenggaraan pemerintahan. “Secara prinsipil kehadirannya di sana mewakili berbagai stake holder yang ada,” tegas Agun yang bicara didampingi jajaran pimpinan Komisi II, Ketua KPU dan Bawaslu.

Tahapan pembentukan DKPP dijadwalkan dimulai 16 Mei sampai dengan 5 Juni yang akan datang. Adapun mekanisme pemilihan 3 orang anggota usulan DPR akan dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan Tata Tertib Dewan. Politisi Partai Golkar ini

berharap akan terpilih anggota DKPP yang memiliki visi, integritas dan memahami etika penyelenggaraan pemilu.

Mekanisme dan detail lain mengenai pemilihan anggota DKPP ini akan dibahas dalam Rapat Kerja dengan Mendagri, Pimpinan KPU dan Bawaslu pada hari Senin (21/5) yang akan datang. Ketika ditanya wartawan tentang kandidat yang akan diusung DPR, ia menolak menyebutkannya.

“Nama-nama itu jangan hari ini, nanti saja biarkan tahapannya berjalan dulu. Mudah-mudahan niat baik kita menuju Pemilu 2014 yang lebih berkualitas dapat terwujud. Kita perlu usung thema Pemilih Cerdas, Memilih Pemimpin Berkualitas,” jelas Agun. (iky)foto:wy/parle



Pertemuan jajaran Pimpinan Komisi II DPR dengan Ketua KPU dan Bawaslu

DPR Nilai Penyelenggaraan UN 2012 Lebih Baik

DPR RI menilai penyelenggaraan UN 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Jajaran Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011-2012

“Dewan mengakui bahwa persiapan yang telah dilakukan Pemerintah untuk menyelenggarakan Ujian Nasional pada tahun ini relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/5)

Walaupun menurut Marzuki masih ditemui berbagai permasalahan, baik yang bersifat substantif maupun teknis, seperti kebocoran soal, tertukarnya soal dan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

“Ujian Nasional hendaknya tidak hanyabertujuan untuk menilai standar keterampilan akademik, namun juga menjadi evaluasi bagi sikap positif yang dibutuhkan dalam kehidupan

nyata ketika peserta didik keluar dari institusi sekolah,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Marzuki minta untuk memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. “Karenanya lembaga pendidikan hendaknya tidak hanya mengasah sumberdaya manusia berpengetahuan, melainkan juga berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” tambah Marzuki.

Dijelaskan Marzuki bahwa pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang

menjadi salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan siswa, melainkan juga ketakwaan dan akhlak mulia.

Oleh karena itu, Marzuki mengingatkan kembali Pemerintah terkait adanya materi pembelajaran dan buku-buku pelajaran kepada anak didik yang menyimpang dari norma agama, sosial, dan budaya bangsa.

“Pemerintah melalui kementerian terkait dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu mencermati kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan atau dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),” imbuhnya. (sc) foto: parle

Pembahasan RAPBN 2013 Harus Teliti dan Profesional

Pimpinan Dewan mengingatkan pembahasan dalam tataran Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 harus benar-benar dilakukan dengan penuh ketelitian dengan mengedepankan profesionalisme dalam menentukan kebijakan anggaran negara.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie dalam Pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012. Rapat Paripurna dilakukan di Gedung DPR Nusantara II senayan Jakarta, Senin (14/5) pagi.

Ketua DPR Marzuki Alie menambahkan, karena hasil Pembicaraan Pendahuluan akan menjadi dasar Pemerintah untuk menyusun besaran APBN 2013 yang akan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2012 yang akan datang, maka dalam kaitan ini Badan Anggaran akan membentuk empat Panitia Kerja agar pembahasannya lebih efisien dan efektif.

Marzuki Alie mengemukakan, bahwa dalam menjalankan fungsi anggaran, selain memantau pelaksanaan APBN tahun Anggaran 2012 oleh Komisi-Komisi DPR, maka untuk memenuhi pasal 157 ayat (2) UU No.27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, Dewan sudah menjadwalkan pembahasan tentang Pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 pada masa Persidangan IV.

Dia juga menegaskan, hal ini merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 152. Dewan mengagendakan Rapat Paripurna Keterangan Pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013 pada tanggal 16 Mei, dan akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna berikutnya, baik berkaitan dengan pandangan umum fraksi maupun tanggapan Pemerintah.

Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan, bahwa agenda berikutnya dalam pembicaraan pendahuluan ini, disesuaikan dengan mekanisme APBN yang telah berjalan selama ini. Proses akhir dari Pembicaraan Pendahuluan RAPBN adalah laporan Badan Ang-



Jajaran Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011-2012

garan DPR-RI kepada rapat Paripurna Dewan yang akan disampaikan pada minggu terakhir bulan Juni 2012.

Marzuki Alie meminta kepada Komisi VII DPR untuk melakukan pembahasan dengan mitra kerjanya berkaitan dengan asumsi harga mi-

nyak mentah dan lifting minyak, kepada Komisi XI juga, diminta melakukan pembahasan bersama Pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, nilai tukar dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN). (Spy) foto:wy/parle



Jajaran Pemerintah saat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011-2012

Kasus Morotai Perlu Komunikasi Yang Baik

Terkait kasus PT Morotai Marine Culture (MMC) yang bersengketa dengan Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Morotai, Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dengan komunikasi antar kedua pihak yang bersengketa tersebut.



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Pada kesempatan itu, Marzuki meminta klarifikasi terhadap kasus tersebut dan minta penjelasan persoalan yang sebenarnya. Karena, menurutnya, informasi yang didapat bisa berbeda dengan apa yang disampaikan rombongan DPRD Kabupaten Morotai. Informasi yang didapat mengatakan bahwa Pemda setempat tidak mendukung adanya PT MMC.

Menurut PT MMC, dikatakan bahwa Kepala Daerah arogan dan tidak memahami betul konteks investasi, komunikasi yang tidak baik, mengedepankan kekuasaan sehingga membuat buntu komunikasi. Bahkan yang berkembang terjadi pengrusakan dan penjarahan peralatan produksi yang dilakukan aparat Pemda.

Tentunya, kata Marzuki, persoalan ini harus segera diluruskan mana yang benar dan mana yang salah dan mencari pemecahan terbaik terhadap per-

soalan tersebut.

Marzuki menambahkan, jika terjadi penangkapan terhadap pejabat Pemda yang dilakukan secara berlebihan dan sewenang-wenang oleh aparat Kepolisian setempat, hal ini menurutnya akan direkomendasikan kepada Komisi III DPR untuk ditindaklanjuti saat rapat kerja dengan Kapolri.

Intinya, kata Marzuki, DPR akan bekerja sebaik-baiknya untuk mencari solusi terbaik agar kasus Morotai dapat segera dicarikan jalan keluarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Morotai M. Ali Sangaji menyampaikan, PT. MMC mulai beroperasi di Morotai sejak tahun 2006 sebelum Kabupaten Morotai ini dilakukan pemekaran.

Menurutnya, kehadiran PT MMC di Kabupaten Morotai ini telah banyak melakukan pelanggaran. Diantaranya

adalah PT MMC tidak memiliki ijin, PT ini juga tidak mempunyai Amdal sehingga diduga merusak lingkungan, tidak memiliki jamsostek dan tidak menaati kewajiban membayar retribusi kepada daerah.

Ali Sangaji mengatakan, DPRD Kabupaten Pulau Morotai mendukung upaya Pemkab Pulau Morotai yang menutup aktivitas PT MMC sebulan lalu karena tak menaati semua kewajiban ke daerah berupa pembayaran kontribusi ke daerah.

Dalam setiap pertemuan, DPRD selalu meminta agar PT MMC dapat memenuhi kewajibannya membayar kontribusi ke daerah sekaligus melengkapi Izin operasional yang berkaitan dengan usaha tambak di daerah ini.

“Setelah kami evaluasi, kenyataan menunjukkan PT MMC belum juga memenuhi kewajiban tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menerima keinginan pemkab setempat,” ujarnya saat menerima kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Morotai Maluku Utara, Selasa (15/5), di ruang rapat Pimpinan DPR RI.

Untuk itu, dalam pernyataan sikapnya, DPRD mendukung dan menyetujui sepenuhnya keputusan serta tindakan Pemkab Pulau Morotai menutup aktivitas PT MMC.

Ali Sangaji menambahkan, perusahaan tersebut begitu arogan dan bahkan menganggap remeh Pemerintah Daerah dan DPRD setempat. “Kami bertanya-tanya dibelakang perusahaan ini siapa kira-kira pejabat di tingkat nasional yang memback up perusahaan ini sehingga tidak patuh pada aturan,” katanya.

PT MMC yang bergerak di bidang budidaya ikan ini diberi ijin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk jenis ikan Napoleon, tapi dalam prakteknya perusahaan terse-

but yang dibudidayakan bukan Napoleon tapi ikan krapu.

Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak punya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), mereka hanya diberi ijin oleh KKP seluas 4,4 ha, namun tanpa

ijin Pemerintah Daerah perusahaan tersebut memperluas ekspansi usahanya sampai 10 ha.

Namun yang sangat kami sesalkan perlakuan yang semena-mena terhadap pejabat Pemda yang ditangkap aparat kepolisian, sementara dari pihak PT MMC tidak pernah diperiksa.

Untuk itu, katanya, kehadiran dia dan rombongan kali ini ingin meminta keadilan dan penegakan hukum yang sebenar-benarnya terhadap kasus ini dan meminta DPR memanggil Kapolri untuk menegur Kapolda yang telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang. (tt) foto:wy/parle

Paripurna DPR Heningkan Cipta Untuk Korban Sukhoi

DPR mengheningkan cipta bersama untuk para korban kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100 (SSJ 100) buatan Rusia.



Jajaran Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011-2012

“Sebelum kami menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011 – 2012, ijinlah Pimpinan atas nama Anggota Dewan menyampaikan Duka Cita yang mendalam serta keprihatian sehubungan dengan terjadinya tragedi kecelakaan pesawat penumpang Sukhoi Super Jet 100 (SSJ 100) buatan Rusia minggu lalu yang menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat di daerah Gunung Salak, Bogor,” ujar

Ketua DPR Marzuki Alie saat membuka sidang Paripurna, di Gedung DPR, Senin, (14/5).

Dia mengharapkan seluruh keluarga korban tabah menghadapi musibah ini dan semoga arwah para korban diterima di sisi-Nya. “Tragedi ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi dunia penerbangan kita,” paparnya.

Kepada seluruh Tim evakuasi, prajurit TNI, Relawan dan semua pihak,

lanjut Marzuki, kami sampaikan penghargaan luar biasa atas langkah-langkah yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan dalam rangka evakuasi kemanusiaan seluruh korban kecelakaan pesawat Sukhoi.

“Untuk itu saya mengajak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat untuk sejenak mengheningkan cipta ditujukan kepada para korban,” katanya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Bahas Soal Produk Halal dengan Kementerian Agama Malaysia

Komisi VIII DPR melakukan tukar pikiran dengan Kementerian Agama Malaysia mengenai jaminan produk halal.



Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah (kanan) saat bertemu Delegasi Kementerian Agama Malaysia

Hal tersebut mengemuka saat Komisi VIII DPR yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah di Gedung Nusantara II, Selasa, (15/5). Sementara delegasi Kementerian Agama Malaysia dipimpin oleh YB. Mejar Jeneral Dato Seri Jamil Khir Bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia.

“Soal produk halal kita sedang me-

nyusun RUU jaminan produk halal, saat ini sudah mulai ada Kesepahaman dengan pemerintah terkait kepastian hukumnya, memang kita akui masih ada perdebatan apakah mandatory (wajib) atau voluntary (sukarela),”ujarnya. Jika memungkinkan, lanjut Ida, DPR ingin tukar pikiran atau sharing dengan Kementerian Agama Malaysia.

Sementara, Terang Ida, Isu-isu

seperti penyelenggaraan haji juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR. Karena itu kita ingin adanya perbaikan terhadap pelayanan jamaah dimasa mendatang. “Saat ini memang sedang disiapkan revisi RUU penyelenggaraan ibadah haji sehingga setiap tahun penyelenggaraan semakin baik. Memang tidak gampang melayani jemaah sampai 200 ribu lebih karena itu Kita banyak belajar dari Malaysia,”paparnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR Surahman mengatakan, kunjungan Malaysia dalam rangka mempererat kedua lembaga DPR RI dengan Malaysia. “kita akan memanfaatkan peluang ini untuk mendengarkan masukan dari Malaysia,”ujarnya.

Mejar Jeneral Dato Seri Jamil Khir mengatakan, didalam industri halal di Malaysia masih diberikan secara sukarela. Artinya, masih memikirkan pedagang kecil karena apabila diwajibkan halal mereka harus mematuhi peraturan. “Malaysia masih sukarela untuk pelabelan produk halal,”paparnya.

Dia menambahkan, Kandungan halal diberikan bukan semata tidak ada kandungan yang haram tetapi ada juga muatan seperti kebersihan, kesehatan, vitamin dan sebagainya.(si)/ foto:iwan armanias/parle.

Dewan Minta Konvensi Buruh Migran Segera Menjadi UU

DPR RI menginginkan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya segera menjadi UU.

Pasalnya, Buruh migran saat ini berada dalam posisi rentan, bekerja di negara lain dan sering tidak memperoleh perlindungan yang layak.

“DPR baru saja menyelesaikan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. RUU ini harus

segera menjadi UU karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan pekerja migran. Yang terakhir adalah kasus penembakan tiga orang TKI asal Nusa Tenggara Barat oleh Polisi Diraja Ma-

laysia, yang sangat menyentuh nurani kita,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/5)

“Dewan meminta agar kasus ini ditindak lanjuti segera melalui investigasi secara tuntas dan melalui jalur diplomatik, agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari,” tambahnya.

Marzuki menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan konvensi ini dalam rangka mendorong penerapan prinsip-prinsip serta norma standar Internasional bagi perlindungan hak buruh seluruh pekerja migran dan keluarganya.

Salah satu pasal dalam konvensi ini menegaskan bahwa tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat



Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011-2012

pekerja migran.

Dalam konvensi ini juga diatur bahwa pekerja migran dan keluarganya harus memiliki hak untuk meminta perlindungan pejabat konsuler atau

diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara tersebut, sehingga semua negara harus meratifikasi konvensi dan mematuhi. (sc) foto: iw/parle

Pansus RUU Pemda Kunjungi Provinsi Sulut

Pansus RUU tentang Pemda telah membentuk 3 (tiga) tim untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker) ketiga daerah, salah satu diantaranya ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada tanggal 21-23 Mei mendatang.

Pada kunjungan hari pertama, Tim Pansus RUU tentang Pemda melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut, DPRD, Walikota, dan Bupati se Provinsi Sulut beserta jajarannya. Kemudian Tim Pansus RUU tentang Pemda juga mengadakan pertemuan dengan Rektor Universitas Sam Ratulangi beserta jajarannya.

Ketua Tim Pansus Pemda Ibnu Munzir dari F-PG mengatakan, maksud dan tujuan Kunker Pansus RUU tentang Pemda ke Provinsi Sulut adalah ingin mendapatkan masukan-masukan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulut. “Masukan-masukan tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat kerja antara Pansus RUU Pemda dengan menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya RUU tentang Pemda,” katanya.

Menurutnya, RUU Pemda merupakan perombakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang sudah dua kali mengalami peruba-

han, dan RUU tersebut merupakan usul inisiatif pemerintah.

Tim Kunker Pansus RUU Pemda ke Provinsi Sulut terdiri dari 11 orang anggota, dipimpin Ketua Tim Pansus Pemda Ibnu Munzir dari F-PG didampingi sejumlah anggota Pansus lintas fraksi, yakni Nanang Samodra, Eddy Sadeli dan Ramadhan Pohan dari F-PD; Ali Wongso Halomoan Sinaga dan Nurul Arifin dari F-PG; Theodorus Jacob Koekerits dari F-PDI Perjuangan; Hermanto dari F-PKS; AW. Thalib dari F-PPP; Baharuddin Nasori dari F-PKB; dan Mestariyani Habie dari F-Partai Gerindra. (iw)/foto: iw



Ketua Pansus Pemda Ibnu Munzir



Suasana Rapat Pansus Pemda

Pendidikan Politik Harus Sedini Mungkin

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Pendidikan politik sangat penting bagi generasi muda karena itu, materi mengenai pendidikan politik dapat dimasukkan didalam muatan bahan pengajaran bagi pelajar.



Ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah) saat menerima Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung DPR RI

“Saya kira bisa dimasukkan didalam pelajaran namun bila didalam kurikulum konteksnya terlalu besar namun dalam konteks berbangsa dan bernegara bisa dimasukkan didalam bahan ajar terkait

Pemilihan Pemilu,” ujar Ketua DPR saat menerima Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Gedung DPR RI, Selasa, (15/5).

Sekarang ini, lanjut Marzuki, memang sulit berkampanye secara substansi karena memang baru kalangan menengah keatas yang aware terhadap politik. “Parpolpun jarang sekali memberikan pendidikan politik bahkan masyarakat diajak untuk mengikuti fatum politik semata,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengharapkan adanya dorongan dari DPR kepada Kemendikbud agar memasukkan kurikulum mengenai pendidikan politik. selain itu, persoalan alkturasi budaya juga menjadi hambatan di masyarakat bawah. “Bahkan masih banyak yang menolak Pemilu langsung apalagi bagi calon yang kalah,”ujarnya. (si) foto: wy/parle

DPR Desak Lapindo Tuntaskan Ganti Rugi

Terkait dengan penanganan korban bencana Lumpur Sidoarjo, Dewan mendesak Lapindo segera menuntaskan masalah ganti rugi terhadap penduduk yang menjadi korban, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial ekonomi daerah, bahkan dapat meluas menjadi skala nasional.

Pada kesempatan itu, lanjut Ketua DPR Marzuki Alie, Dewan meminta

Pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Menyinggung kejadian bencana gempa bumi di Propinsi Aceh baru-baru ini, Ketua DPR Marzuki Alie menyesalkan perangkat early warning system tidak berfungsi pada saat terjadi gempa bumi.

“Hal ini patut menjadi perhatian bagi Pemerintah setempat, karena

perangkat ini akan meminimalisir jatuhnya korban bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami. Demikian pula dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Aceh Tenggara, membutuhkan penanganan secara cepat dan memadai, terutama yang terkait dengan kebutuhan bahan pangan dan sanitasi,”jelasnya saat membuka Sidang Paripurna Masa sidang IV, Senin, (14/5). (si)

Ketua DPR Tunggu Hasil Investigasi Jatuhnya Sukhoi

Ketua DPR Marzuki Alie menghimbau agar seluruh pihak menenangkan diri sampai ada investigasi mengenai kejatuhan pesawat Sukhoi super jet 100 tersebut di kawasan Gunung Salak.

“Kita harus tunggu investigasi mengenai kejatuhan pesawat sukhoi jangan sampai ada kasus saling menyalahkan. Sebaiknya investigasi secara utuh apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat tersebut,”ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jum’at, (11/5).

Menurutnya, medan dan cuaca masih buruk karena itu menyulitkan tim evakuasi mencapai target lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi tersebut. “mari kita serahkan orang yang ahli dibidangnya agar segera diterjunkan supaya korban cepat terevakuasi,”tegasnya.

Dia menambahkan, mari kita serahkan persoalan jatuhnya pesawat ini kepada Komisi perhubungan DPR untuk menanyakan langsung kepada lembaga terkait. “Kalau bicara ijin kelayakan terbangnya dalam rangka mengangkut penumpang memang seharusnya ada, jika tidak ada ini tidak benar karena itu harus dicek dahulu dengan Komisi



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Perhubungan,”ujarnya.

Seperti diberitakan, Pesawat Sukhoi Superjet 100 yang sedang melakukan joy flight hilang kontak di kawasan Gunung Salak, Bogor, 9 Mei 2012. Sehari setelahnya dipastikan pesawat

buatan Rusia itu jatuh di lereng Gunung Salak. Badan pesawat pecah berkeping-keping. Dalam pesawat tersebut, diperkirakan terdapat 45 penumpang, 8 di antaranya merupakan kru asal Rusia. (si) foto:parle

Taufik Kurniawan Dorong BK Usut Video Porno Mirip Anggota DPR

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong Badan Kehormatan (BK) DPR, segera mengusut kasus video porno mirip anggota DPR. BK diminta segera memberikan laporan penyelidikan kasus tersebut.

“Kita menunggu laporan BK,” kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2012).

Menurut Taufik, pimpinan BK sudah berkomitmen akan segera melakukan klarifikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Pertama kita menunggu dari teman-teman pimpinan BK. Pimpinan BK sekarang kan lagi mulai, menurut informasi kabarnya akan segera melakukan klarifikasi sesuai mekanisme,” paparnya. (si) foto:parle



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan



Hari Kebangkitan Nasional

Ke-104 Tahun 2012

**Dengan Semangat Hari Kebangkitan Nasional,
Kita Tingkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
yang Berkarakter, Damai dan Berdaya Saing
Menuju Masyarakat yang Sejahtera**

